

# Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Demi Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dan Transparansi Pertanggungjawaban APBDes Pada Pemerintah Desa Kepunten Tulangan Sidoarjo

Oleh:

Marita Anggraeni (192010300100)

Dosen Pembimbing :

Dr. Hadiyah Fitriyah, SE, M.Si

Progam Studi Akuntansi  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

April, 2024

# Pendahuluan

Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 menyatakan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Akuntabilitas di pemerintahan melibatkan kapasitas pemerintah desa untuk bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan terkait dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi diperlukan sistem pengelolaan, pelaporan dan pengendalian keuangan yang efektif dan memadai sehingga dapat memberikan penyediaan informasi yang relevan dan mudah untuk dipahami terhadap pelaksanaan kepentingan.

# Pendahuluan

BPKP yang bertanggung jawab untuk memantau akuntabilitas keuangan desa telah menciptakan sebuah sistem pengelolaan keuangan desa yang dikenal sebagai Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan sebuah program yang dipakai oleh desa untuk melaksanakan pembuatan anggaran, pengelolaan dan melaporkan keuangan desa.

Kewajiban melaksanakan tanggung jawab (akuntabilitas) pemerintah desa juga tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin kuat posisi, kewenangan, dan perekonomian desa, maka diharapkan pelaksanaan pemerintah desa akan lebih transparan dengan dukungan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan Lembaga Desa. Namun, pihak pemerintah desa terkadang terkendala dalam memahami aplikasi sistem keuangan desa tersebut.

# Rumusan Masalah

- Bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan desa demi mewujudkan akuntabilitas pemerintah desa dan transparansi pertanggungjawaban APBDes pada pemerintah desa kepunten tulangan sidoarjo?

# Metode Penelitian

- **Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari narasumber melalui proses tanya jawab

- **Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan teknik pengamatan (observation), wawancara, dan juga dokumentasi

# Metode Penelitian

- **Sumber Informasi**

Sumber informasi atau informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Kaur Keuangan, dan terakhir Sekretariat Desa

- **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Mereduksi data merupakan proses penggolongan dan penyederhanaan data yang diperoleh di lapangan
2. Penyajian data merupakan kegiatan mengumpulkan data yang disusun secara sistematis
3. Penarikan kesimpulan merupakan tahap memaknai informasi yang terkumpul guna mengambil kesimpulan sebagai solusi dari masalah yang ada

# Hasil

- Pemerintah Desa Kepunten telah menerapkan sistem secara online yang bernama SISKEUDES. SISKEUDES ini dapat membantu pemerintah desa dalam membuat laporan keuangan dengan tepat waktu. SISKEUDES ini berisi laporan perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban.
- Pemerintah Desa Kepunten sudah mewujudkan akuntabilitas pemerintah desa yang terbagi menjadi 2 jenis yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal yang pemerintah desa lakukan yaitu pertanggungjawaban dan pengelolaan dana desa kepada otoritas yang lebih tinggi. Akuntabilitas horizontal yang pemerintah desa lakukan yaitu pertanggungjawaban yang diberikan kepada Masyarakat luas.
- Pemerintah Desa Kepunten sudah mewujudkan transparansi pertanggungjawaban APBDes seperti Desa ini setiap tahunnya melakukan musyawarah melalui Lembaga desa seperti BPD dalam melakukan pertanggungjawaban desa dan realisasi APBDes.

# Pembahasan

- Desa Kepunten ini telah menerapkan Sistem Keuangan Desa sejak tahun 2019. Sebelum penerapan SISKEUDES pemerintah Desa Kepunten menggunakan Microsoft Excel dan menggunakan aplikasi dari kecamatan yang bernama aplikasi Cepet Mari dalam pembuatan laporan keuangannya. SISKEUDES tersebut dapat membuat pelaporan keuangannya menjadi tepat waktu. Karena mulai dari awal penginputan perencanaan desa, penganggaran APBDes, penatausahaan desa, sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban desa dapat dilakukan dengan sekali input di aplikasi SISKEUDES.
- Akuntabilitas vertical yang pemerintah desa lakukan terkait pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa kepada otoritas yang lebih tinggi sudah dilakukan oleh desa kepunten setiap tahunnya, karena sudah menjadi kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan oleh desa untuk melaporkan hasil dari pengelolaan keuangan desa kepada pemerintah kabupaten sidoarjo. Dan akuntabilitas horizontal yang telah pemerintah desa kepunten wujudkan seperti desa kepunten ini telah menyajikan laporan realisasi anggaran APBDes tahun sebelumnya dan anggaran APBDes tahun sekarang melalui media informasi berupa banner. Implementasi akuntabilitas desa yang pemerintah desa kepunten wujudkan sesuai Permendagri No.20 tahun 2018 pasal 39 terkait penyampaian informasi mengenai APBDes kepada Masyarakat melalui media informasi menggunakan banner yang memuat APBDes dan pelaksanaan kegiatan anggaran.

# Pembahasan

- Dengan sistem keuangan desa pemerintah desa kepunten dapat mewujudkan transparansi pertanggungjawaban APBDes. Dengan SISKEUDES ini BPKP juga dapat memantau secara langsung terkait pengelolaan keuangan dan dana desa. Desa kepunten juga mewujudkan transparansi kepada Masyarakat desa sendiri, setiap tahunnya pemerintah desa selalu mengadakan musyawarah melalui Lembaga desa seperti BPD dalam melakukan pertanggungjawaban desa dan realisasi APBDes. Musyawarah ini juga diikuti oleh Lembaga desa lainnya seperti Lembaga desa Tingkat RT dan Rw.

# Temuan Penting penelitian

- Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang di sampaikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pertanggungjawaban terkait laporan keuangan Desa Kepunten kepada pemerintah daerah dan Masyarakat kepunten sendiri sudah dilakukan setiap tahunnya demi mewujudkan akuntabilitas pemerintah desa dan pertanggungjawaban APBDes.
- Selanjutnya Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ini sangat membantu kaur keuangan desa dalam pengelolaan keuangan desa dan dapat membuat pelaporan keuangannya menjadi tepat waktu.

# Manfaat Penelitian

Untuk mengetahui pemerintah desa dalam menerapkan sistem keuangan desa yang dapat mewujudkan akuntabilitas pemerintah desa dan transparansi pertanggungjawaban APBDes. Dengan penerapan sistem keuangan desa ini diharapkan pemerintah desa dapat mewujudkan akuntabilitas pemerintah desa dan transparansi pertanggungjawaban APBDes.

# Referensi

- Ika Asmawati and Prayitno Basuki, “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa,” *Akurasi J. Stud. Akunt. dan Keuang.*, vol. 2, no. 1, pp. 63–76, 2019, doi: 10.29303/akurasi.v2i1.15.
- W. A. Takasihaeng, N. R. Pioh, and W. Waworundeng, “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Pembangunan Tahun 2017 di Desa Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe,” *J. Akunt.*, vol. 3, no. 3, pp. 1–10, 2019, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/26912>
- W. Azizah, “AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA Andayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya,” 2018.
- A. Kusuma and I. B. Riharjo, “Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas TRANSPARAN, AKUNTABEL, PARTISIPATIF, TERTIB DAN DISIPLIN ANGGARAN ( Studi Empiris di Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman ),” *J. Ilmu dan Ris. Akunt.*, vol. 8, no. 10, pp. 1–23, 2019.
- D. Suyono and F. E. A. Prakoso, “Implementasi Program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2017,” *Indones. Gov. J. Kaji. Polit.*, vol. 1, no. 1, 2018, doi: 10.24905/pgj.v1i1.1214.

